

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan

Arsalim

Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia; arsalim@gmail.com

*Correspondence : arsalim@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat covid 19 memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya penurunan angka kemiskinan. Desain penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara kepada infoman kunci; observasi partisipasi, dan Studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya distorsi komunikasi, dan belum akuratnya data para aktor kebijakan mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat terdampak COVID 19. Terfragmentasi pelaku kebijakan dalam struktur birokrasi menimbulkan konflik of interest masing-masing OPD dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Selain itupula tidak padunya monitoring dan evaluasi secara berkala menyebabkan kesulitan untuk mengukur secara mendalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan kelompok sasaran, baik dalam konten maupun konteks kebijakan (*content dan context policy*). Target capaian antara titik awal (*setting goals*) dan titik akhir (*achievement them*) belum dapat diketahui secara pasti, sehingga dibutuhkan *new public policy* dalam penanggulangan kemiskinan.

ABSTRACT

The goal of this research is to find out to what extent the implementation of poverty alleviation policies due to Covid 19 has had an impact on increasing people's welfare, especially reducing poverty. The research design is qualitative, while the data collection technique used in this research is by interviewing key informants; Participatory Observation, and Study. The results of the study show that there are still distortions in communication, and inaccurate data on policy actors affecting the effectiveness of distributing direct assistance to people affected by COVID 19. Fragmentation of policy actors in the bureaucratic structure creates conflicts of interest for each OPD from the central, provincial and district levels. Apart from that, the lack of regular monitoring and evaluation has made it difficult to measure in depth the success of poverty reduction for the target group, both in terms of content and policy context. The achievement targets between the starting point (*setting goals*) and the end point (*achievement them*) cannot be known with certainty, so a new public policy is needed in poverty alleviation.

Kata kunci

Implementasi Kebijakan, kemiskinan, Covid 19, Konawe Selatan

Keywords

Policy Implementation, poverty, Covid 19, South Konawe

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup merisaukan banyak orang dan dianggap sebagai penyakit sosial yang paling dahsyat dan menjadi musuh utama kepada rancangan pembangunan negara (Abdullah, 1984). Kemiskinan bukan saja dilihat sebagai fenomena ekonomi semata-mata, tetapi juga sebagai masalah sosial dan politik (Alhabshi, 1996). Masalah kemiskinan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya; tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan diikuti oleh keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam masyarakat. Sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, sebab jika tidak, kesenjangan antar golongan masyarakat maupun antar wilayah akan mencuat kepermukaan, sehingga akan mengganggu pembangunan nasional.

Gencarnya upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendapat tantangan yang luar biasa dengan adanya wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) sejak tahun 2019 dan masih terasa sampai sekarang. Menurut data BPS tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 2,7 juta orang. Khusus di Kabupaten Konawe Selatan jumlah masyarakat miskin bertambah dari 33.890 pada tahun 2019 menjadi 34.220 (2020) dari jumlah penduduk 308.524, sehingga Konawe Selatan menduduki urutan tertinggi sebagai kabupaten termiskin dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara, (BPS Konawe Selatan, 2020).

Untuk mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan yang diakibatkan oleh wabah covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti mengoptimalkan Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Pangan Non-Tunai/Bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), bahkan pemerintah mengeluarkan PP No.23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Corona. Bantuan stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM, seperti subsidi bunga kredit dan bantuan produktif usaha mikro. Dalam konteks Kabupaten Konawe Selatan, pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan desa.

Untuk implementasi kebijakan publik dalam hal pemberian bantuan, maka Dwidjowijoto, (2004) melihat ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Gordon yang dikutip Keban (2006) juga menyatakan bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Bergman (Sunarko, 2003) mempertegas tekanan implementasi kebijakan pada bentuk program dengan menyatakan bahwa bentuk pelaksanaan kebijaksanaan dengan pendekatan program menghendaki adanya kejelasan, ketepatan, mencakup keseluruhan. Sekali keputusan itu diambil, maka semua prosedur dalam pelaksanaan program dikehendaki untuk

diikuti oleh seluruh tingkat organisasi-organisasi pelaksana atau badan pemerintah yang terkait.

Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Merilee.S. Grindle (1980), teori ini mengidentifikasi dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu *isi kebijakan (konten)* dan *konteks* dari implementasi itu sendiri. Secara terperinci; a) Grindle mengidentifikasi sebagai berikut:*Contens Policy (isi kebijakan)* meliputi 1) *Interest affected* (kepentingan siapa yang terlibat); 2) *Type of benefits* (macam-macam manfaat); 3) *Extent of change envisioned* (sejauhmana perubahan akan terwujudkan); 4) *Site of decision making* (tempat pembuatan keputusan);5) *Program implementors* (siapa yang menjadi implementor agensi);6) *Resouces] committed* (sumber daya yang disediakan); b) *Context of Implementasion*, meliputi 1) *Power, interest, and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat); 2) *Institutions and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rejim); 3) *Compliance and responsiveness* (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif).

Beberapa hasil penelitian terdahulu terhadap dampak pandemi Covid 19 antara lain Pakpahan (2020) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rizal Montovani (2021), dimana tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.. Hasil penelitian ini menunjukkan Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. Kemudian Dina Risnita dan Jean Elikal Marna (2021), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap jumlah rumah tangga miskin di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap jumlah rumah tangga miskin di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman, yaitu: (1). Berkurangnya pendapatan dari pekerjaan utama rumah tangga, (2). Berkurangnya bantuan biaya kebutuhan rumah tangga yang biasa ditanggung oleh anak, (3). Sulitnya mencari pengerjaan lain setelah kehilangan pekerjaan utama, (4). Terjadinya penurunan rata-rata pengeluaran rumah tangga, (5). Terjadinya perubahan pola konsumsi rumah tangga. Demikian pula, studi yang dilakukan oleh Erni Panca Kurniasih (2020). Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pandemic covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak. Hasil penelitiannya yaitu, pendapatan responden mengalami penurunan tajam antara 30%-70% di awal masa pandemi sementara pengeluaran cenderung tetap

Keempat penelitian terdahulu memfokuskan pada dampak pandemi Covid 19 pada aspek kehidupan ekonomi secara langsung bukan pada aspek implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat Covid 19. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan mengambil obyek baru yang belum pernah dilakukan penelitian secara mendalam dari sisi implelementasi kebijakan yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. Sasaran penerima manfaat kebijakan pemberian bantuan dampak COVID 19 adalah kelompok penduduk miskin dan masyarakat yang terdampak. Aparat pemerintah bertugas memfasilitasi dan memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akibat COVID 19 maka dialokasikan berbagai bantuan pemerintah yaitu , kartu sembako dan beras bulog, bantuan sosial tunai, BLT UMKM, Bantuan Subsidi Upah dan subsidi gaji, kartu pra kerja , Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program sinkronisasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui relokasi Alokasi Dana Desa (ADD). Implementasi kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah banyak melibatkan peran-peran dari aktor atau badan-badan pemerintahan, juga kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat. Oleh sebab itu menarik untuk dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pasca Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Metode

Desain penelitian ini adalah kualitatif, menurut Garna (1999) bahwa pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala tersebut tidak memungkinkan di ukur secara tepat. Data yang diperlukan berupa data primer yang berasal dari informan dari hasil wawancara, dan observasi dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan masyarakat yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dampak akibat Covid 19. Data lain adalah data sekunder bersumber dari artikel, studi literatur, dokumen dan foto, data statistik, arsip baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat serta publikasi media massa. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman dalam (Ramdani et al., 2021; Sudirman & Phradiansah, 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Konten Kebijakan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kab. Konawe Selatan

a. Pihak yang Kepentingannya Dipengaruhi

Dalam pemahaman Grindle, yang dimaksud dengan pihak yang kepentingannya dipengaruhi adalah semua pihak yang dalam melakukan aktivitasnya terkait dengan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan dalam konteks kepentingan yang dipengaruhi belum secara menyeluruh melibatkan pihak-pihak terkait yang benar-benar berkompetensi. Seluruh kegiatan dari awal sampai pada akhir pelaksanaan itu tidak berjalan dalam kawalan yang bersifat saling membangun dalam proses kelancaran pelaksanaan. Permasalahan yang ada, kaitannya dengan kepentingan yang dipengaruhi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan proses komunikasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat penerima bantuan. Adanya *social distancing* yang ketat menyebabkan proses komunikasi langsung ke masyarakat tidak berjalan optimal, meskipun dengan menggunakan teknologi informasi tetapi ada wilayah-wilayah terdampak yang tidak bisa mengakses teknologi informasi seperti beberapa desa di wilayah Kecamatan Laonti.

b. Manfaat yang Diperoleh

Program-program yang dibuat dan diimplementasikan selain dapat memberikan keuntungan juga terdapat kendala sehingga kebijakan program tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan yang menjadi tujuan kebijakan itu sendiri. Hasil wawancara dengan beberapa informan yang memberikan informasi bahwa melalui program pemberian bantuan untuk terdampak COVID 19 memberikan keuntungan bagi masyarakat penerima kebijakan tersebut, utamanya bantuan sosial sembako dan beras bulog serta Bantuan Langsung Tunai dari APBN utamanya PKH dan bantuan UMKM maupun dari APBD dalam bentuk alokasi dana desa. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan mengenai data-data penerima manfaat. Ketidakakuratan data menyebabkan tidak meratanya alokasi penerima manfaat. Data yang digunakan tidak di update sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak terakses dengan bantuan tersebut. Informasi lain menunjukkan bahwa diperlukan suatu program ke depan yang bukan hanya mengutamakan pemberian bantuan langsung Pasca covid 19 tetapi adanya stimulasi program yang mendorong stabilnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Model pengentasan kemiskinan saat ini tidak lagi mengarah pada charity strategy, karena strategi seperti ini lebih berorientasi Assistencialism, (Freire, 1974 dalam Mubyarto, 1995) yang memandang masyarakat sebagai objek asistensi atau objek bantuan dalam pelbagai pelayanan dan pemberian fasilitas sosial. Hal ini makin memperbesar tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah yang merendahkan martabat kemanusiaan, dimana pemerintah malah menciptakan pengemis baru.

c. Perubahan Yang Diharapkan

Tingkat perubahan yang diharapkan juga merupakan pilar ketiga dari implementasi kebijakan program. Tingkat perubahan yang diharapkan dari Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat Covid 19 dapat memberikan perubahan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya, utamanya yang sifatnya jangka pendek yaitu penanggulangan kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara hasil itu hasil wawancara dengan seorang informan yang dianggap lebih mengetahui tindakan dan kendala yang terjadi dan dialami oleh masyarakat kelompok, dan individu setempat menyatakan bahwa dalam perspektif jangka menengah dan panjang diperlukan reformulasi kebijakan baru (*new public policy*) yang bisa mendorong *income generating* dalam menghadapi perubahan perilaku kehidupan pasca pandemik, utamanya dalam mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Kebijakan publik yang diperlukan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga kebijakan yang bersifat jangka panjang sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007) bahwa dalam hal pengentasan kemiskinan diperlukan kebijakan yang bersifat jangka pendek maupun kebijakan bersifat jangka panjang.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sebuah kebijakan yang diimplementasikan tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan tempat dimana kebijakan itu dilaksanakan, maka setidaknya, kebijakan tersebut akan menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Karena itu perlu suatu tahapan pembuatan keputusan, agar dapat mempermudah jangkauan organisasi-organisasi atau pihak pelaksana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian program bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak covid 19 merupakan suatu kebutuhan nyata dan menjadi manifestasi atas tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman kemiskinan. Berbagai keterangan dari sejumlah informan yang penulis peroleh, berdasarkan strategi yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan bahwa tempat pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan/kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program dan setting lokasi yang terdampak meliputi seluruh wilayah kabupaten Konawe selatan yang meliputi 336 desa, 15 kelurahan dan 25 Kecamatan. Namun demikian temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih belum terkoordinasinya dengan baik sasaran lokasi dari berbagai program bantuan yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga ada wilayah yang over program bantuan dan ada wilayah yang minim bantuan.

e. Pelaksana Program

Menurut Grindle pelaksana program adalah mereka yang terkait erat dengan eksekusi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Mereka adalah para administrator di semua jenjang hierarki birokrasi. Mereka adalah para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah yang bertanggung jawab atas hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan sebuah program, tentu para pelaksana program menjadi penentu bagaimana program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat pula mempengaruhi bagaimana kebijakan itu dapat diterima oleh penerima kebijakan atau sasaran dimana kebijakan itu dilaksanakan. Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan dapat menyentuh sasaran yang ditargetkan, tergantung siapa yang akan ditunjuk atau diberi tugas untuk melaksanakan program tersebut. Penjelasan di atas senada dengan apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir terdahulu bahwa, Keputusan yang dibuat selama perumusan kebijakan juga mungkin mengindikasikan siapa yang akan diberi tugas untuk menyelesaikan berbagai macam program dan keputusan tersebut sehingga dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan itu ditindak. Pelaksana kegiatan dari pusat sampai ke kabupaten Konawe Selatan dibetuk dalam sebuah keputusan presiden, gubernur dan bupati yang beranggotakan semua unsur dan stake holder.

Menurut keterangan dari seorang informan tentang apa yang dimaksudkan di atas dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat COVID 19, para pelaksana menunjukkan sikap yang sangat mendukung proses pelaksanaan melalui penerapan setiap kegiatan yang mereka wujudkan sesuai dengan mekanisme pengaturan pelaksanaan kebijakan yang telah diinstruksikan. Tuntutan masyarakat disikapi dan ditindak lanjuti sebagai informasi yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan dalam merespons dan memenuhinya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat konawe selatan dalam upaya perwujudan kesejahteraan ekonomi. Namun informasi yang diperoleh penulis dari informan yang lain, yang juga sebagai pelaksana kebijakan program di lapangan, berbeda dalam memberikan keterangan. Banyaknya dan beragamnya tim koordinasi yang berasal dari berbagai kementerian, instansi dan dinas (OPD) menyebabkan agak lambannya proses pengambilan keputusan penyaluran BLT dan Bansos. Bahkan ada instansi tertentu dari pusat dan propinsi yang langsung kelapangan menyalurkan bantuan dengan menggunakan data yang tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya. Letak pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sebuah kebijakan yang diimplementasikan tidak memperhatikan.

f. Komitmen terhadap Sumber Daya

Yang dimaksud dengan komitmen terhadap sumber daya adalah sejauh mana para elit pemerintah dan elit politik (para pembuat kebijakan) mempunyai kepedulian terhadap penyediaan sumber daya untuk mendukung implementasi program (Grindle, 1980). Dukungan sumber daya seperti kemampuan SDM yang memadai, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam implementasi program. Hal ini akan mendorong implementor mampu mengatasi berbagai persoalan dan memenuhi aneka kebutuhan yang dibebankan kepadanya. Grindle menambahkan bahwa bagaimana bentuk tujuan dirumuskan dalam formulasi kebijakan akan sangat berpengaruh, apakah jelas atau justru

bercabangcabang, atau apakah pejabat politik dan administrasi sepakat tentang sasaran sasaran tersebut. Karena itu, menurut Grindle, pelaksana kebijakan didukung oleh sumber-sumber daya yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Hal yang sama dikemukakan oleh Edwards III (1980) yang mengatakan:

“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information; the authority; and facilities (including building, equipment, land and supplies).”

Yang dimaksud oleh Edwards III kaitannya dengan sumber daya yang penting mencakup staf yang cukup (jumlah dan mutu) dengan keahlian tertentu, informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang jelas guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan kecukupan fasilitas yang dibutuhkan seperti bangunan, peralatan, tanah dan perbekalan. Fakta dalam penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor beranekaragam, dari ketersediaan sumber-sumber struktur hubungan antar pemerintahan yang memadai, komitmen para pejabat dan mekanisme pelaporan di dalam birokrasi, pengaruh politik dari orang-orang yang menentang kebijakan menyebabkan ketidakefektifan korespondensi diantara pengambil kebijakan terhadap layanan yang seharusnya diberikan.

2. Konteks Kebijakan Implementasi Kebijakan Penanggulangan kemiskinan Akibat Covid 19 di Kab. Konawe Selatan

Menurut Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh isi dari kebijakan yang dibuat, akan tetapi dari kenyataan yang ada menunjukkan bahwa dampak tatanan sosial, politik, dan ekonomi secara umum juga memiliki pengaruh besar dalam pencapaian target program. Untuk itu, Grindle mensyaratkan untuk melihat konteks atau tujuan dan sasaran dalam implementasi kebijakan. Secara prinsip, terdapat beberapa faktor yang menjadi fokus konteks bahasan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat COVID 19 di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut:

a. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat

Dalam implementasi kebijakan tentu melibatkan para aktor yaitu para perencana tingkat nasional, pemerintah daerah, regional, politisi daerah, dan stakeholders. Kualitas kebijakan akan dipengaruhi oleh kemampuan para aktor yang terlibat dalam proses pembuatan dan penetapan kebijakan yang dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya kesepakatan di antara para aktor yang terlibat. Jika terjadi kesepakatan atau titik-temu kepentingan di antara berbagai aktor, maka tidak akan terjadi aksi penolakan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Sebaliknya, jika sebelumnya tidak terjadi kesepakatan atau titik-temu di antara para aktor, maka resiko benolakan akan terjadi. Jadi dalam kondisi tersebut, unsur kekuatan untuk implementasi kebijakan tidak terbatas pada unsur aktor tunggal saja, tetapi tersebar di antara para aktor yang saling terkait dan berperan penting terhadap implementasi kebijakan. Secara khusus, peneliti melihat bahwa dalam konteks implementasi program kebijakan tersebut di

Kabupaten Konawe Selatan terjadi polarisasi kekuatan, kepentingan, dan strategi dari setiap aktor yang terlibat. Suatu kebijakan dapat terealisasi apabila program itu dibutuhkan Oleh masyarakat, artinya program yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan kehendak atau kepentingan publik. Pendapat Grindle mengenai *who gets what* (siapa mendapatkan apa) tentu menjadi acuan bagi peneliti ketika melakukan penelitian. Dari hasil wawancara terbuka yang dilakukan, menunjukkan bahwa para pelaksana hanya bekerja sesuai petunjuk teknis sehingga bila ada masalah teknis di lapangan yang seharusnya dapat diselesaikan secepatnya menjadi terhambat dan tertunda karena menunggu persetujuan dari pelaksana yang berkewenangan untuk menanganinya. Tentunya ini sangat menghambat percepatan proses pelaksanaan dan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara baik dan tidak sesuai dengan waktu dan tujuan yang ditetapkan.

b. Institusi dan Karakteristik Rezim

Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kekuatan rezim politik, organisasi administratif, institusi politik, dan tipe rezim ketika kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan. Artinya, institusi politik yang otoriter maupun demokratis akan sangat terpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam mencapai tujuan suatu kebijakan dari program yang telah dirumuskan yang nantinya di implementasikan maka para pejabat atau pelaksana dihadapkan dengan dua masalah bawahan yaitu, menyoroti interaksi lingkungan program dan administrasi program. Para pejabat menekankan problem bagaimana untuk mencapai penyelesaian, memerlukan dukungan kaum elit politik dan bagaimana mengimplementasikan dan dari birokrasi itu siapa yang akan ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan program tersebut. Proses implementasi mungkin berbeda-beda bergantung pada kekuatan politik adalah salah satunya otoriter atau sistem lebih terbuka dimana menekankan tingkat responsif yang lebih luas, baik itu bagi para pejabat politik maupun pemerintahan dan membatasi kapasitas yang ditekankan. Informasi yang diperoleh penulis, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat/kelompok sasaran secara langsung dan terbuka. Pelaksana dan personalia-personalia yang terlibat dalam penyaluran bantuan program pada semua level pemerintahan belum memiliki akurasi data dan sistem administrasi yang mumpuni, sehingga dalam pelaksanaan audit oleh lembaga auditor (inspektorat dan BPK) masih berbagai permasalahan dan penyelewengan.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Selain faktor institusi dan karakteristik Kabupaten Konawe Selatan, terdapat juga faktor yang tidak kalah pentingnya dalam konteks implementasi kebijakan penanggulangan kemsikinan akibat Covid 19, yaitu adanya kepatuhan dan daya tanggap (Compliance and Responsiveness). Faktor ini tidak secara terpisah dari faktor sebelumnya, tetapi sebagai satu kesatuan dalam pencapaian tujuan implementasi suatu kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn bahwa,

“Implementasi benar-benar dipertimbangkan oleh para pejabat pemerintahan dan selama minimnya jumlah responsif dalam hal informasi diperhatikan sehingga mampu mengevaluasi pencapaian program dan dukungan yang penting menuju kesuksesan. Informasi lapangan yang diolah menunjukkan bahwa pihak pelaksana program banyak menerima laporan dari Sekertariat Tim penanggulangan Covid 19, dengan kurang mengklarifikasi pelaksanaan di lapangan sehingga kurang responsive apabila terjadi masalah di masyarakat yang terdampak covid 19. Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala menyebabkan proses penyaluran bantuan kepada kelompok-kelompok miskin kurang efektif. Dampaknya terdapat kesulitan untuk mengukur sejauhmana dampak bantuan tersebut dalam jangka pendek masa pandemi covid 19 bisa menanggulangi kemiskinan.

Dari paparan di atas terkait dengan isi kebijakan yang menyangkut: (1) kepentingan yang dipengaruhi; (2) tipe manfaat; (3) tingkat perubahan yang diprediksi; (4) sisi pembuat keputusan; (5) pelaksana program; (6) sumber daya yang ada. Dan terkait dengan konteks implementasi kebijakan, yang menyangkut : (1) kekuatan, keputusan, strategi dari pelaku terkait; (2) karakteristik institusi dan regim; (3) tuntutan dan respon yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Presmann dan Wildavsky (1979:21) juga mengurai makna implementasi dengan menyatakan bahwa *implementation maybe viewed as process of interaction between the setting of goals and action geared to achievement them*. Implementasi menurutnya dapat dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Presmann dan Wildavsky melihat implementasi kebijakan sebagai mata rantai yang menghubungkan titik awal “*setting of goal*” dengan titik akhir “*achievement them*”. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan distorsi komunikasi, dan belum akuratnya data para aktor kebijakan mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat terdampak COVID 19. Terfragmentasi pelaku kebijakan dalam struktur birokrasi menimbulkan konflik of interest masing-masing OPD dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, dan tidak adanya monitoring dan evaluasi secara berkala menyebabkan kesulitan untuk mengukur secara mendalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan utamanya yang terdampak COVID 19. Artinya bahwa target target capaian antara titik awal (setting goals) dan titik akhir (achievement them) belum dapat diketahui secara pasti.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik simpulan bahwa Implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada karena secara umum masih dipengaruhi oleh berbagai

kepentingan pihak-pihak tertentu (conflict of interest) dan adanya distorsi komunikasi, dan belum akuratnya data para aktor kebijakan sehingga mempengaruhi efektivitas penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat terdampak COVID 19 serta kurang padunya dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menyebabkan kesulitan untuk mengukur secara mendalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan utamanya yang terdampak COVID 19. Selain itu pula masih kurang akuratnya sistem administrasi dan pendataan memunculkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan evaluasi kebijakan dan formulasi kebijakan baru (new public policy) sehingga dalam jangka panjang pasca COVID 19 kondisi sosial ekonomi masyarakat kembali normal dan angka kemiskinan dapat berkurang.

Referensi

- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan implikasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Dina Risnita, Jean Elikal Marna. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman, *Jurnal Al-Intifaq 1 (1)*,52
- Dwijowijoto, Nugroho. R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementas, dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edward, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Erni Panca Kurniasih. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak, *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. ISBN: 978-602-53460-5-7.
- Garna, K, Judistiara. (1999). *Metode Penelitian Sosial, Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan, Desain dan Rencana Penelitian*. Bandung: Primoko, Akademika,
- Grindle, Merilee.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, New Jersey, Princeton University Press,
- Hairi Abdullah, ed. (1984). *Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Serpendapatan Rendah*. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava media.
- Biro Pusat Statistik Konawe Selatan. (2020). Konawe Selatan dalam Angka,
- Mubyarto. (1984). *Strategi pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta : P3KPUGM.
- Presman, J and Wildavsky. A. (1979). *Implemetation*. Berkeley : University of California Press.
- Ramdani, W. N. R., Nasir, M., & Sudirman, F. A. (2021). Implementasi Aplikasi SiCANTIK pada Dinas PMPTSP Kota Kendari : Tinjauan E-Government. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305>

- Risal Montovani, Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar, <http://digilibadmin.unismuh.ac.id>, 2021
- Saefullah, Djadja. (2007). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Jakarta :LP3AN.
- Sunarko, SD. (2003). *Public Policy*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Syed Othman Alhabshi. (1996). "Poverty Eradication From Islamic Perspectives", <http://vlib.unitarkll.edu.my/staff-publications/datuk>, layari pada Ogos 2000.
- Sudirman, F. A., & Phradiansah, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821>